

# Sukarno: Respon Terhadap Ketidakstabilan Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal 1956-1959

Lamia Rozianna Putri

<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang, roziannalamia@students.unnes.ac.id

**Abstrak:** Diberlakukannya sistem Demokrasi Liberal atau Parlemerter di Indonesia sejak tahun 1950-1959 ternyata dianggap kurang cocok oleh Presiden Sukarno. Anggapan ini muncul karena melihat kondisi politik pada periode tersebut cenderung tidak stabil dan justru didominasi oleh kepentingan setiap partai. Ini juga menjadi akibat dari adanya sistem multipartai yang dijalankan sehingga banyak partai politik yang bermunculan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon Presiden Sukarno terhadap kondisi politik yang ada pada periode tersebut. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah dengan studi pustaka. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi tahap pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasilnya, Presiden Sukarno merespon kondisi politik pada saat itu dengan menggaungkan mengenai Nasakom, Konsepsi Presiden yang didalamnya turut memuat pengenalan sistem Demokrasi Liberal, Kabinet Gotong Royong, dan Dewan Nasional, hingga pada puncaknya Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang secara resmi mengakhiri pemberlakuan sistem parlementer dan periode Demokrasi Liberal di Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.144>

\*Correspondensi: Lamia Rozianna Putri  
Email: roziannalamia@students.unnes.ac.id

**Keywords:** Sukarno; Demokrasi Liberal; Sistem Parlemerter; Konsepsi Presiden; Dekrit Presiden.

Received: 24 Februari 2024

Accepted: 23 Maret 2024

Published: 27 April 2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

and the Liberal Democracy period in Indonesia.

**Abstrak:** *The implementation of the Liberal Democracy or Parliamentary system in Indonesia from 1950-1959 was deemed unsuitable by President Sukarno. This assumption arose because the political conditions in that period tended to be unstable and were dominated by the interests of each party. This is also a result of the multiparty system that is being implemented, so that many political parties have emerged. This article aims to explain how President Sukarno responded to the political conditions that existed during that period. In writing this article, the author used historical research methods with literature study. The steps in the historical research method include the topic selection stage, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. As a result, President Sukarno responded to the political conditions at that time by echoing Nasakom, the Presidential Concept which included the introduction of the Liberal Democracy system, the Mutual Cooperation Cabinet, and the National Council, until at its peak President Sukarno issued the 1959 Presidential Decree which officially ended the implementation of the parliamentary system.*

**Keywords:** Sukarno; Liberal Democracy; Parliamentary System; Presidential Concept; Presidential Decree.

## Pendahuluan

Sejak resmi dibubarkannya RIS pada tahun 1950, sistem pemerintahan di Republik Indonesia dijalankan dengan mengadaptasi sistem parlementer barat. Periode ini kemudian dikenal dengan masa Demokrasi Liberal (Ramadhan, 2022; Sholehuddin, 2015; Ulwiyah, 2015; Wijaya, 2014). Sistem pemerintahan ini berjalan dengan berlandaskan Undang-Undang Sementara 1950 dan secara administratif terbagi menjadi 10 wilayah provinsi

dengan hak otonomi. Dalam sistem parlementer atau liberal, seorang presiden hanya bertindak sebagai kepala negara, sementara dalam pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana menteri. Seorang perdana menteri akan memimpin suatu dewan atau yang biasa disebut dengan kabinet dan bertanggung jawab terhadap parlemen (DPR) (Altiparmakis, 2021; Fishel, 2017; Legg, 2020; Ravary, 2019a).

Pada masa demokrasi liberal, banyak tumbuh dan berkembang partai politik sebagai akibat dari diberlakukannya sistem multipartai. Sistem tersebut membuat banyak partai saling bersaing untuk mencapai puncak kekuasaan baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Akibatnya dalam kurun waktu yang singkat kurang lebih selama 9 tahun diberlakukannya sistem politik liberal sudah terjadi sebanyak 7 kali pergantian kabinet. Hal ini, menyebabkan kondisi politik di Indonesia tidak stabil karena adanya persaingan yang tidak sehat di antara partai-partai yang ada. Partai-partai tersebut berupaya keras agar partainya dapat mencapai puncak kekuasaan demi kepentingan internal partai. Keadaan semakin diperburuk dengan adanya perbedaan ideologi di antara partai-partai tersebut.

Melihat situasi dan kondisi yang ada membuat Presiden Sukarno sebagai kepala negara menyadari bahwa sistem seperti ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan masyarakatnya yang heterogen. Sistem Demokrasi Liberal dianggap tidak dapat membawa negara pada situasi dan kondisi yang damai, serta tidak dapat membawa rakyat mencapai kesejahteraan hidup. Jika sistem Demokrasi Liberal tetap dijalankan, maka hanya akan membawa konflik yang bersifat inheren dan tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia (Almusallam, 2022; Altiparmakis, 2021; Driss, 2019; Forhan, 2019; Gould, 2018; Hiscock, 2018; Potrafke, 2018; Reichert, 2018; Zhang, 2018). Dalam merespon ketidakstabilan politik pada masa itu, Presiden Sukarno menyampaikan beberapa gagasannya untuk mengubah sistem pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini mengenai bagaimana respon Presiden Sukarno terhadap kondisi politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950-1959. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap yang diambil oleh Presiden Sukarno sebagai kepala negara dalam menghadapi kondisi politik pada masa demokrasi liberal 1950-1959, yang dinilai kurang sesuai untuk diterapkan sebagai sistem pemerintahan di Indonesia.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian sejarah oleh Kuntowijoyo. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, Kuntowijoyo menyebutkan terdapat lima tahapan dalam metode penelitian sejarah, meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap pemilihan topik, penulis memilih respon Presiden Sukarno terhadap kondisi politik pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959. Setelah menentukan topik, penulis memasuki tahap kedua, yaitu tahap heuristik. Pada tahapan heuristik atau pengumpulan data, penulis mengumpulkan berbagai studi pustaka berupa buku dan jurnal yang relevan dengan pembahasan yang akan ditulis dalam artikel. Selanjutnya, sumber-sumber yang

telah didapatkan akan melewati tahap kritik sumber guna melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan agar informasi yang didapatkan semakin akurat dan membawa pada kebenaran yang objektif. Penulis kemudian melakukan tahapan selanjutnya, yaitu interpretasi atau penafsiran yang dilakukan dengan menganalisis dan menafsirkan berbagai informasi yang didapatkan agar dapat menghasilkan narasi sejarah yang lebih objektif. Setelah semua rangkaian tahapan tersebut dilakukan, maka tahap terakhir adalah melakukan historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahapan historiografi, penulis akan merangkai seluruh hasil analisis menjadi narasi sejarah yang utuh untuk para pembaca.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Riwayat Kehidupan Presiden Sukarno

Sukarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 yang merupakan putra dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ketika lahir, ia diberi nama Kusno Sosrodihardjo, tetapi karena karena sering sakit dan sesuai dengan kebiasaan orang Jawa, maka namanya diganti dan hingga kini dikenal dengan nama Sukarno. Ayah Sukarno merupakan seorang bangsawan Jawa yang berprofesi sebagai guru, sementara ibunya adalah seorang perempuan Bali keturunan dari kasta Brahmana (salah satu kasta terpendang di Bali). Kedua orang tuanya bertemu ketika sang ayah ditugaskan mengajar di sekolah dasar Bumiputra di Singaraja, Bali.

Pendidikan formal Sukarno dimulai di Sekolah Rendah Bumiputra, kemudian dilanjutkan ke Hoogere Burger School (HBS) yang merupakan sekolah menengah bagi kaum Eropa dan Bumiputra di Surabaya. Dalam menjalani pendidikan sekolah menengah, Sukarno tinggal bersama Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto, yang merupakan tokoh berpengaruh dalam dunia pergerakan sekaligus pemimpin Partai Sarekat Islam. Dari sini lah wawasan politik Sukarno mulai terbuka dan semakin terasah (Darmawan, 2023). Sukarno kemudian melanjutkan pendidikannya ke Technische Hoogeschool (THS) yang merupakan sekolah tinggi teknik yang ada di Bandung pada Juni 1921. Pendidikannya pun selesai pada tahun 1926 dan setelah itu Sukarno semakin hanyut dalam kegiatan pergerakan nasional.

Selama perjuangannya pada masa pergerakan nasional, Sukarno berkali-kali harus merasakan tinggal di balik jeruji besi. Namun, hal tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk membawa bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Semua kerja keras Sukarno dan para pejuang kemerdekaan mulai terbayarkan ketika teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu, Sukarno bersama Mohammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Dalam penerapannya terdapat dua periode berbeda, yaitu periode antara tahun 1945-1949 dan periode tahun 1950-1959. Namun, Presiden Sukarno berpendapat bahwa penerapan sistem parlementer tidak cocok untuk Negara Republik Indonesia. Ini karena pada saat itu kondisi politik semakin tidak stabil dan berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Memburuknya kondisi politik di

Indonesia disebabkan oleh sistem kepartaian yang diterapkan dan adanya kepentingan dari masing-masing partai yang ada.

## **B. Kondisi Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959**

Sistem kepartaian dalam periode ini menganut sistem multipartai berdasarkan maklumat pemerintah 3 November 1945, sehingga banyak partai yang bermunculan dan berkembang. Partai-partai tersebut nantinya akan menjalankan pemerintahan sebagai konsekuensi dari dijalankannya sistem politik demokrasi liberal parlementer dengan gaya barat. Pada periode ini tercatat kurang lebih ada 30 partai, 4 diantaranya adalah partai besar yang mendominasi jalannya pemerintahan. Keempat partai tersebut diantaranya ada Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indoensia (Masyumi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai-partai ini lah yang nantinya berkuasa di parlemen atau dalam kabinet pemerintahan (Almusallam, 2022; Astara, 2020; Hosek, 2020; Khan, 2021; Nofre, 2019; Ravary, 2019b; Vaczi, 2021).

Diberlakukannya sitem multi partai pada awalnya memberikan dampak yang cukup positif. Rakyat menjadi memiliki peluang terbuka untuk menyampaikan gagasan mereka. Namun, kebebasan dalam sistem multi partai juga mmebuat orang-orang menjadi dapat dengan mudah mendirikan partai. Tidak jarang pratai-partai tersebut didirikan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Ini menjadi awal pemicu munculnya persaingan tidak sehat di antara partai-partai yang ada. Partai-partai ini berambisi dan saling bersaing untuk menduduki kabinet. Dengan menduduki kabinet, membuatpartai yang berkuasa merasa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merealisasikan program atau gagasan mereka. Persaingan juga disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi dari masing-masing partai.

Persaingan yang tidak sehat dalam pemerintahan membuat sering terjadi pergantian kabinet sepanjang periode masa pemerintahan demokrasi liberal tahun 1950-1959. Tercatat sudah terjadi 7 kali pergantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), hingga yang terakhir adalah Kabinet Djuanda (1957-1959). Pergantian kabinet yang terlalu sering berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia yang mulai tampak pada akhir tahun 1956. Mulai banyak terjadi pergolakan daerah dan gejolak dalam instansi pemeritahan, termasuk angkatan perang. Pergolakan yang terjadi berlandaskan pada rasa ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja kabinet yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan dari oarang-orang atau partai-partai yang menduduki kabinet.

## **C. Respon Presiden Sukarno Terhadap Kondisi Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959**

Respon pertama yang diberikan oleh Presiden Sukarno terjadi pada tahun 1956 dengan mengungkapkan kembali gagasannya mengenai Nasakom. Gagasan tersebut merupakan penggabungan dari tiga kekuatan besar yang ada di Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunis. Unsur nasionalisme direpresentasikan oleh golongan tentara. Unsur Agama direpresentasikan oleh golongan Islam. Sementara, unsur komunis direpresentasikan oleh golongan komunis itu sendiri. Tujuan utama dari gagasan ini adalah untuk menyatukan unsur-unsur tersebut agar dapat saling bekerja sama dengan baik dalam membangun negara. Melalui Nasakom, presiden kemudian mengusulkan adanya bentuk pemerintahan yang baru dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan menyampaikan bahwa komunis dilibatkan dalam pembentukan kabinet. Akan tetapi, jika dilihat dari komponen yang ada tampaknya akan sulit untuk direalisasikan karena adanya perbedaan ideologi yang sangat signifikan antara komunis dan Islam.

Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Sukarno kembali menyampaikan gagasannya sebagai bentuk respon dari ketidakstabilan politik pada masa itu. Gagasan ini disampaikan oleh presiden tanpa sepengetahuan kabinet dalam pertemuan di Istana Merdeka yang dihadiri oleh para pemimpin partai dan tokoh masyarakat. Gagasan tersebut nantinya dikenal sebagai Konsepsi Presiden dengan memuat tiga isi pokok didalamnya. Pertama, Sistem Demokrasi Parlemeter Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, sehingga harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Kedua, dalam pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin akan dibentuk Kabinet Gotong-Royong dengan beranggotakan semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan dalam masyarakat. Pada bagian ini, Konsepsi Presiden menjadi penengah pembentukan "Kabinet Kaki Empat", yang mana partai besar yang terlibat tidak hanya PNI, NU, dan Masyumi, tetapi di dalamnya juga ada keikutsertaan PKI dalam menciptakan nilai gotong-royong nasional. Ketiga, adanya pembentukan Dewan Nasional dengan tugas utama memberi nasihat kepada kabinet, baik ketika diperlukan maupun tidak. Anggota dari Dewan Nasional terdiri dari golongan fungsional masyarakat.

Puncak dari respon Presiden Sukarno terhadap ketidakstabilan politik yang ada adalah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pemicu utama dari dikeluarkannya Dekrit Presiden oleh Presiden Sukarno karena konstituante mengalami kegagalan dalam menyusun undang-undang dasar yang baru. Penyusunan ini dilakukan karena UUDS 1950 dalam Demokrasi Liberal dianggap gagal dan tidak sesuai dengan keadaan tata negara Indonesia. Ada pun isi dari Dekrit Presiden meliputi pembubaran konstituante, UUD 1945 kembali diberlakukan, UUDS 1950 sudah tidak berlaku, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Melalui Dekrit Presiden ini, Presiden Sukarno semakin menegaskan mengenai sistem Demokrasi Terpimpin dan menjadi akhir dari pemberlakuan sistem Demokrasi Liberal di Indonesia.

## Simpulan

Dari pemaparan di atas maka dapat terlihat bahwa Presiden Sukarno menilai sistem pemerintahan Demokrasi Liberal atau Parlementer dengan gaya barat dan di dalamnya terdapat sistem multi partai ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Sistem ini justru rawan memicu perpecahan rakyat Indonesia yang bersifat heterogen. Ketidaksiuaian sistem ini membuat banyak bermunculan partai politik yang membawa kepentingan masing-masing kemudian bersaing untuk menduduki kursi kabinet, tetapi mengesampingkan kesejahteraan rakyat hingga terjadi berbagai pergolakan. Presiden Sukarno sebagai kepala negara kemudian menyampaikan beberapa gagasannya sebagai bentuk respon dari situasi dan kondisi yang ada. Pada tahun 1956, Presiden Sukarno kembali menggaungkan mengenai Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis) sebagai upaya untuk mempersatukan unsur-unsur besar dalam pemerintahan Indonesia. Kemudian, pada tahun 1957, Presiden Sukarno menyampaikan gagasannya mengenai Konsepsi Presiden dengan gagasan yang ada meliputi pengenalan sistem Demokrasi Terpimpin, pembentukan Kabinet Gotong-Royong, dan Dewan Nasional yang nantinya akan langsung berada di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Puncaknya adalah ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dengan ini pokok meliputi pembubaran konstituante, pemberlakuan UUD 1945, tidak belakunya UUDS 1950, dan pembentukan MPRS, serta DPAS.

### Daftar Pustaka

- Adryamasrthano, V dan Widya Lestari Ningsih. (2022, Mei 24). "Dampak Sistem Multipartai Pada Masa Demokrasi Liberal." Kompas.com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/24/120000279/dampak-sistem-multipartai-pada-masa-demokrasi-liberal?page=all>, diakses pada 8 Oktober 2023.
- Almusallam, I. (2022). Politic offering behaviour among Saudi females: Is there any place for quantitative analysis in discursive politeness? *Journal of Pragmatics*, 200, 76–97. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2022.08.003>
- Altiparmakis, A. (2021). Pandemic politics: policy evaluations of government responses to COVID-19. *West European Politics*, 44(5), 1159–1179. <https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1930754>
- Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 14-14.
- Astara, I. W. W. (2020). Legal politic of tourism village management based on local wisdom value of pancasila's legal ideals. *International Journal of Entrepreneurship*, 24(5), 1–12.
- Darmawan, W. (2023). Renaissance Pedagogy, Dedication of Life, and the School of Life: Soekarno's Thoughts on Education. *Paramita*, 33(2), 329–340. <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i2.41342>
- Driss, O. B. (2019). From citizens to government policy-makers: Social media data analysis. *Government Information Quarterly*, 36(3), 560–570. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.002>

- 
- Fishel, S. R. (2017). The microbial state: Global thriving and the body politic. *The Microbial State: Global Thriving and the Body Politic*, 1–144.
- Forhan, K. L. (2019). Polycracy, Obligation, and Revolt: The Body Politic in John of Salisbury and Christine de Pizan. *Politics, Gender, and Genre: The Political Thought of Christine de Pizan*, 33–52.
- Gould, C. F. (2018). Government policy, clean fuel access, and persistent fuel stacking in Ecuador. *Energy for Sustainable Development*, 46, 111–122. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2018.05.009>
- Hakim, A. B. (2023). Sukarno dan Nasakom dalam Pendekatan Idiosinkratik (psikologi kepemimpinan). *Conseils: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(1), 13-19.
- Hiscock, R. (2018). Tobacco industry strategies undermine government tax policy: Evidence from commercial data. *Tobacco Control*, 27(5), 488–497. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2017-053891>
- Hosek, L. (2020). The Body Politic and the Citizen's Mouth: Oral Health and Dental Care in Nineteenth-Century Manhattan. *Historical Archaeology*, 54(1), 138–159. <https://doi.org/10.1007/s41636-019-00215-6>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/28/155317169/dinamika-politik-partai-masa-demokrasi-liberal?page=all>. Diakses pada 8 Oktober 2023.
- Jun, Wang Xiang. (2008). *Soekarno Uncensored*. Yogyakarta: Pustaka Radja.
- Khan, A. (2021). In Defence of an Unalienated Politic: a Critical Appraisal of the 'No Outsiders' Protests. *Feminist Review*, 128(1), 132–147. <https://doi.org/10.1177/01417789211013777>
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Legg, S. (2020). Political lives at sea: working and socialising to and from the India Round Table Conference in London, 1930–1932. *Journal of Historical Geography*, 68, 21–32. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2019.12.005>
- Nofre, J. (2019). Urban change and touristification in the neighbourhood of alfama (lisbon): An approach to the historic and politic factors of the process of airbnbisation. *Estudios Geograficos*, 80(287). <https://doi.org/10.3989/estgeogr.201929.015>
- Poesponegoro, M. D dan Nugroho Notosusanto. (2008). *Sejarah. Nasional Indonesia jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Potrafke, N. (2018). Government ideology and economic policy-making in the United States—a survey. *Public Choice*, 174(1), 145–207. <https://doi.org/10.1007/s11127-017-0491-3>
- Prabowo, G dan Serafica Gischa. (2020, Oktober 28). "Dinamika Politik Partai Masa Demokrasi Liberal." *Kompas.com*.
- Ramadlan, M. F. S. (2022). *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi*. Universitas Brawijaya Press.

- 
- Ravary, A. (2019a). Shaping the Body Politic: Mass Media Fat-Shaming Affects Implicit Anti-Fat Attitudes. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 45(11), 1580–1589. <https://doi.org/10.1177/0146167219838550>
- Ravary, A. (2019b). Shaping the Body Politic: Mass Media Fat-Shaming Affects Implicit Anti-Fat Attitudes. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 45(11), 1580–1589. <https://doi.org/10.1177/0146167219838550>
- Reichert, F. (2018). How important are political interest and internal political efficacy in the prediction of political participation? Longitudinal evidence from Germany / La importancia del interés en la política y de la eficacia política interna en la predicción de la participación política. Datos longitudinales originados en Alemania. *Revista de Psicología Social*, 33(3), 459–503. <https://doi.org/10.1080/02134748.2018.1482056>
- Riawan, Y. H. U. (2016). Kebijakan Politik Pemerintahan RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Universitas Sanata Darma. Skripsi.
- Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 365-378.
- Sholehuddin, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959- 1965. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1).
- Simbolon, R. (2018). Pengaruh sistem Multi Partai Pada Masa Demokrasi Liberal Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia 1950-1959.
- Taum, Y. Y. (2013). Manusia Indonesia dan Keterpenjaraannya: Meretorik Ulang Wacana Indonesia". In Makalah Seminar.
- Ulwiyah, D. Y. (2015). Majalah Gadjah Mada Masa Demokrasi Liberal (1950- 1959). UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Vaczi, M. (2021). Corporeal performance in contemporary ethnonationalist movements: the changing body politic of Basque and Catalan secessionism. *Social Anthropology*, 29(3), 602–618. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.13010>
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 136–158.
- Zhang, P. (2018). Performance-based or politic-related decomposition of environmental targets: A multilevel analysis in China. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103410>